



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA, FEBRUARI 2024



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang telah disinergiskan dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan

diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara lebih baik.

Samarinda, Februari 2024

**Plt. KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN**



**Ir. IRHAMSyah, S.T.,M.T.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690116 199303 1 003

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dasar Pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam revisi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil Capaian Kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis I</b>			
Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (Angka)</b>	<b>Realisasi (Angka)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Rasio Konektivitas Provinsi	<b>0.846</b>	<b>0.846</b>	<b>100</b>

<b>Sasaran Strategis II</b>			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	<b>76</b>	<b>76.8*</b>	<b>101</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	<b>83</b>	<b>82.01</b>	<b>98.81</b>

\*Penilaian mandiri

Dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis I Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mempunyai 1 (satu) indikator yaitu Rasio Konektivitas Provinsi, dimana capaian realisasi sesuai target yang ditetapkan, capaian ini didukung dengan adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan angkutan perkotaan yang telah terwujud di Kota Balikpapan. Sasaran Strategis II Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mempunyai 2 (dua)

indikator) yaitu;

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan adalah angka sementara menggunakan penilaian mandiri dengan capaian sesuai target yang ditetapkan, capaian ini didukung dengan adanya perbaikan pada komponen perencanaan kinerja dan laporan kinerja.

Pada capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan realisasi capaian tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh pelayanan di Terminal Tipe B Bontang dan Sangatta yang belum optimal dikarenakan dalam tahap revitalisasi.

**DAFTAR ISI**

Halaman

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Sumber Daya Manusia .....	6
1.5 Aspek Strategis Organisasi .....	13
1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	16
1.7 Sarana dan Prasarana Kerja .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	25
2.1 Pencanaan Strategis .....	25
2.2 Indikator Kinerja Utama Dishub Prov Kaltim .....	39
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	41
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	47
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya 2023 .....	47
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	52
3.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran .....	53
3.4 Capaian Tujuan Pada RPD .....	86
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	90
4.1 Kesimpulan .....	90
4.2 Saran .....	91

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Pembentukan Organisasi**

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah. Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Perhubungan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2010 dan Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim.

## **1.2 Tugas dan Fungsi**

### 1. Tugas

Sesuai dengan Pergub No. 63 Tahun 2016 Dinas Perhubungan mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

### 2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pergub No. 63 Tahun 2016 pasal 249, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pelayaran;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

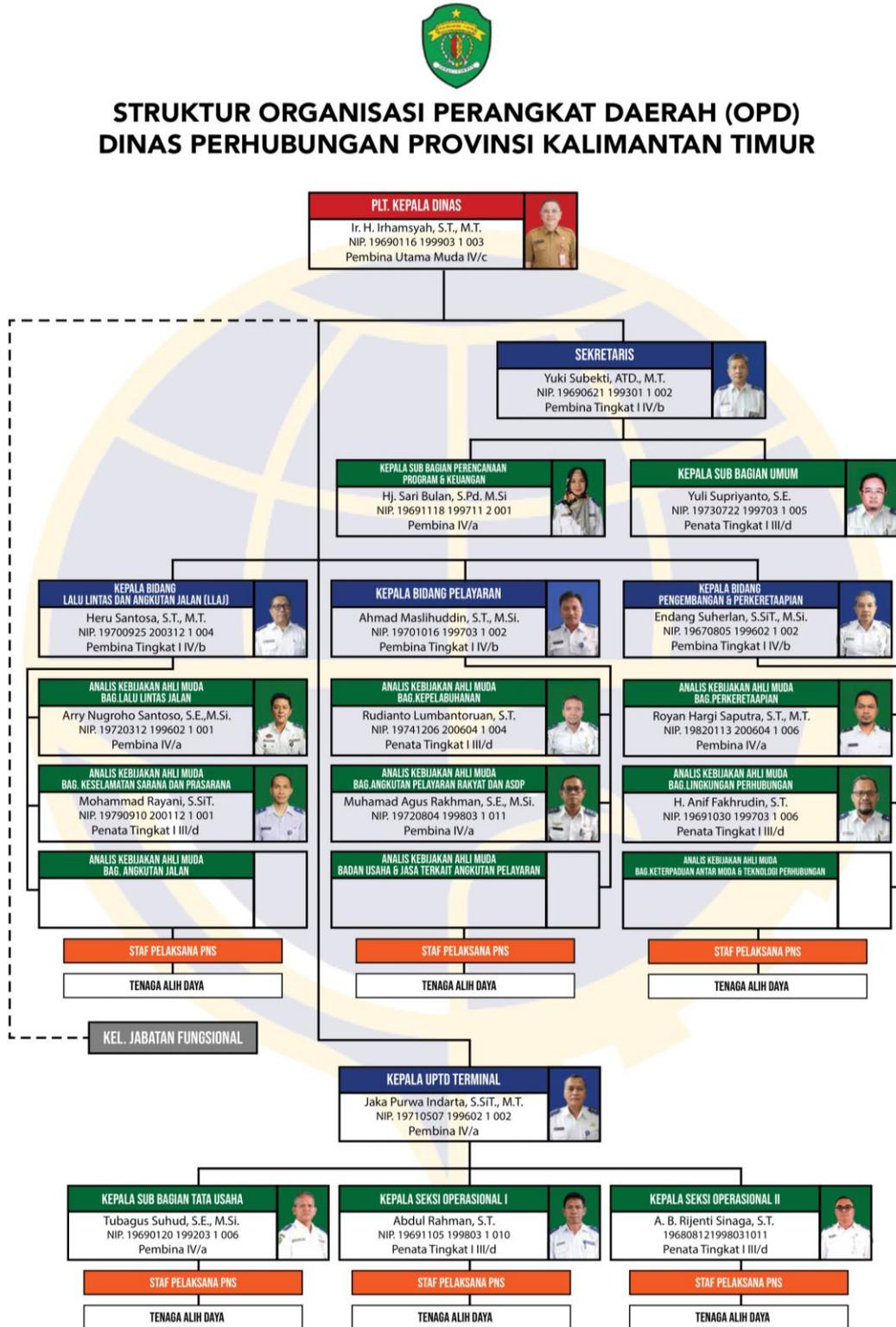
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, Sekretaris memimpin Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memimpin Sub Bidang Koordinator Lalu Lintas Jalan, Sub Bidang Koordinator Keselamatan Sarana dan Prasarana dan Sub Bidang Angkutan Jalan;
4. Bidang Pelayaran, Kepala Bidang Pelayaran memimpin Sub Bidang Koordinator Kepelabuhanan, Sub Bidang

Koordinator Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP dan Sub Bidang Koordinator Badan Usaha & Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;

5. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian, Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian memimpin Sub Bidang Koordinator Lingkungan Perhubungan, Sub Bagian Perkeretaapian dan Sub Bidang Koordinator Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan;
6. Kepala UPTD;
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
8. Kepala Seksi Operasional I;
9. Kepala Seksi Operasional II.

Pada Tahun 2022 terjadi penyetaraan Jabatan Pengawas menjadi Jabatan Fungsional, Penyetaraan tersebut berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Sehingga seluruh Jabatan Pengawas Bidang disetarakan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terkecuali Sekretariat yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2023**



Sumber: Dishub Prov. Kaltim Tahun 2024

#### **1.4 Sumber Daya Manusia**

ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ASN yang handal, memiliki kemampuan berpikir secara rasional dan logis, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, serta meningkatkan kualitas kinerja individu.

Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim**

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				PENDIDIKAN					
	L	P	IV	III	II	I	PASCA SARJANA	SARJANA	D-III	SLT A	SLT P	SD
<b>Kepala Dinas</b>												
<b>Sekretaris</b>	1		1				1					
<b>Kepala Bidang LLAJ</b>	1		1				1					
<b>Kepala Bidang Pelayaran</b>	1		1				1					
<b>Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian</b>	1		1				1					
<b>Kepala UPTD Terminal</b>	1		1				1					
<b>Kepala Subbag Umum</b>	1			1				1				
<b>Kepala Subbag Perencanaan Program dan</b>		1	1				1					

<b>Keuangan</b>												
<b>Kasubbag Tata Usaha Terminal</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				<b>1</b>					
<b>Kasi Operasional I Terminal</b>	<b>1</b>			<b>1</b>				<b>1</b>				
<b>Kasi Operasional II Terminal</b>	<b>1</b>			<b>1</b>				<b>1</b>				
<b>Pengelola Terminal</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>15</b>	<b>2</b>	
<b>Jlh PNS</b>	<b>56</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	
<b>Jlh Honor/PTT</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>21</b>		
<b>Jlh PNS +Honor/PTT</b>	<b>87</b>	<b>43</b>	-	-	-	-	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	

*Sumber: Sub Bag Umum Sekretariat Dishub Kaltim Tahun 2024*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki jumlah Sumber Daya Aparatur sebanyak 73 orang Pegawai Negeri Sipil dan 57 orang Pegawai Tidak Tetap (Outsourcing).

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	
		L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	SLTP	2	-
3	SLTA	30	5
4	Sarjana Muda (D-III)	1	2
5	Sarjana (S1/D-IV)	12	8
6	Pasca Sarjana (S-2)	11	2
7	Doktor (S-3)	-	-
Jumlah		56	17
<b>TOTAL</b>		<b>73</b>	

*Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2024*

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH	
		L	P
1	I/a Juru Muda	-	-
2	I/b Juru Muda Tk. I	-	-
3	I/c Juru	-	-
4	I/d Juru Tk. I	1	-
5	II/a Pengatur Muda	1	-
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	1	-
7	II/c Pengatur	5	-
8	II/d Pengatur Tk. I	9	2
9	III/a Penata Muda	11	1
10	III/b Penata Muda Tk. I	6	3
11	III/c Penata	2	4
12	III/d Penata Tk. I	10	6
13	IV/a Pembina	6	1
14	IV/b Pembina Tk. I	4	-
15	IV/c Pembina Utama Muda	-	-
16	IV/d Pembina Utama Madya	-	-
Jumlah		56	17
<b>TOTAL</b>		<b>79</b>	

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2024

**Tabel 1.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

NO	STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JUMLAH	
		L	P
1	Eselon II	-	-
2	Eselon III	5	-
3		4	1
Jumlah		9	1
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2024

**Tabel 1.5**  
**Komposisi Tenaga Kontrak Tahun 2024**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	
		L	P
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	14	7
4	D-III	1	2
5	S-1	16	14
6	S-2	-	3
Jumlah		31	26
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2024

**Tabel 1.6**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan**

NO	STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JUMLAH	
		L	P
1	<b>Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim</b>	-	-
2	<b>Sekretaris</b>	1	-
a	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	-	1
b	Sub Bagian Umum	1	-
3	<b>Kepala Bidang Perhubungan LLAJ</b>	1	-
4	<b>Kepala Bidang Pelayaran</b>	1	-
5	<b>Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian</b>	1	-
6	Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	28	13
<b>Jumlah Keseluruhan Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim</b>		<b>33</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47</b>	

<b>1</b>	<b>Kepala UPTD Terminal</b>	1	-
a	Sub Bagian Tata Usaha	1	-
b	Seksi Operasional I	1	-
c	Seksi Operasional II	1	-
2	Pegawai UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	19	3
<b>Jumlah Keseluruhan Pegawai UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim</b>		<b>23</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>	

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2024

### 1.5 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Dinas perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan pada hakekatnya memiliki tugas dalam membantu Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan pencapaian visi misinya terutama pada bidang kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan sarana transportasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki peran penting dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam tujuan meningkatkan aksesibilitas wilayah terutama pada aspek transportasi di Kalimantan Timur.

Dinas Perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah

daerah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan jasa pelayanan transportasi yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perhubungan. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Selain itu, tujuan dan sasaran yang dihasilkan juga memperhatikan penyelarasan indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Adapun slogan pembangunan periode tahun 2024-2026 adalah “Membangun Kaltim Untuk Nusantara”. Slogan “Membangun Kaltim Untuk Nusantara” yang ditunjang dengan arah kebijakan berupa :

1. Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat-Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

Dimana hal tersebut diatas di implementasikan dalam program prioritas :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Pengelolaan Pelayaran
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian
4. Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B

Selanjutnya Dinas Perhubungan Prov Kaltim melakukan identifikasi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Teknik identifikasi menggunakan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dalam lingkungan internal identifikasi dalam bentuk Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) yang merupakan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas. Sedangkan dari lingkungan eksternal diidentifikasi dalam bentuk Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang merupakan dorongan dan hambatan kinerja dengan hasil sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths*)
  - a. Adanya kewenangan pengelolaan sektor perhubungan di daerah;
  - b. Adanya dukungan dari berbagai stakeholders transportasi baik instansi vertikal maupun di daerah serta organisasi profesi;
  - c. Adanya potensi sumber daya alam serta deregulasi perundang-undangan yang memberikan peluang kepada daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk turut berkiprah dalam dunia transportasi.
2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas memerlukan peningkatan pengawasan dan pengelolaan yang profesional;
  - b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana sehingga belum tergalinya potensi pengelolaan bidang tugas seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan global;
  - c. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional.
3. Peluang (*Opportunities*)
- a. Adanya peluang peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur;
  - b. Terdapat minat penanaman modal di daerah yang berhubungan erat dengan dunia usaha transportasi;
  - c. Adanya kebijakan Pemerintah dalam penataan dan pengembangan wilayah.
4. Ancaman (*Threats*)
- a. Rendahnya ketertarikan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
  - b. Masih rendahnya kedisiplinan dan pemahaman masyarakat pelaku transportasi.

Dengan menggunakan metode SWOT faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada dikelompokkan kedalam 4 strategi yaitu :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/kendala
3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang

4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Dari strategi tersebut diambil faktor-faktor kunci sebagai berikut :

1. Pemberdayaan, peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber dana secara optimal;
3. Sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan di bidang transportasi;
4. Penegakan hukum secara konsisten (taat azas);
5. Peningkatan, koordinasi antar/inter instansi;
6. Peningkatan mutu pelayanan.

### **1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya . Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi yang akan mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Adapun Permasalahan yang ada pada Bidang-bidang dan UPTD di Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut :

#### **1. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Bidang Perhubungan LLAJ, antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, lampu penerangan jalan dan lain-lain data menunjukkan angka kecelakaan cukup tinggi namun tingkat fatalitas menurun;
2. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan *over loading* (ODOL) di jalan;
4. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
5. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Belum optimalnya pelaksanaan program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
7. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum;
8. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP.

## **2. Permasalahan Bidang Pelayaran**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pelayaran, antara lain :

1. Masih adanya pemahaman yang berbeda antara PP No. 38 Tahun 2007 dengan KM Perhubungan No. 58 Tahun 2007 terhadap penanganan kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan

2. Belum tersusunnya Dokumen Studi Lingkungan di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
3. Belum tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
4. Belum terciptanya pelaporan angkutan laut secara periodik dan berjenjang
5. Belum tersusunnya dokumen administrasi (izin lokasi, izin pembangunan dan izin operasional) terhadap beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
6. Perlunya rasionalisasi luasan DLKR dan DLKP untuk beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
7. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan pelabuhan laut di Kalimantan Timur
8. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan Pelabuhan Khusus dan atau dermaga khusus di Kalimantan Timur
9. Beberapa pelabuhan laut belum dikembangkan sesuai dengan masterplan sehingga berakibat kapasitas pelabuhan laut tidak sebanding dengan aktifitas/permintaan jasa angkutan laut
10. Pelayanan pelabuhan masih konvensional
11. Sempit dan dangkalnya alur pelayaran disebabkan pelabuhan berada di sungai
12. Masih minimnya fasilitas keselamatan pelayaran
13. Kondisi keamanan dan tertib di pelabuhan laut belum optimal karena sarana kapal patroli, kapal navigasi dan kapal pandu jumlahnya terbatas dan umurnya relatif tua
14. Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy di kabupaten Kutai Timur yang merupakan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

### **3. Permasalahan Pengembangan dan Perkeretaapian**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian, antara lain :

1. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi;
2. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda;
3. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga sungai, danau dan penyeberangan;
4. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/dermaga SDP di Kaltim;
6. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se Kaltim;
7. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan;
8. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur.

### **4. Permasalahan UPTD Termnial**

1. Belum tersedianya Rencana Induk Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Belum tersedianya perencanaan terminal terpadu di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Belum tersedianya kajian lingkungan (UKL/UPL) Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;

4. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kurangnya tenaga ASN yang memiliki kompetensi Teknis tentang pengelolaan terminal;
6. Masih minimnya tenaga ASN di Terminal Type B yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS;
7. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Angkutan antar Terminal Tipe B di Kalimantan Timur;
8. Belum adanya Standar Pelayanan Operasional (SOP) di Terminal Type B;
9. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyediaan fasilitas dan operasional di Terminal Type B;
10. Belum adanya regulasi tentang legalitas asset Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi.
11. Masih adanya lahan terminal yang dalam penguasaan masyarakat

### **1.7 Sarana dan Prasarana Kerja**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Khusus prasarana kendaraan dinas/operasional di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7

## Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2

<b>N O</b>	<b>JENIS/MERK KENDARAAN</b>	<b>NO. POLISI</b>	<b>TAHUN PEMBELIAN</b>	<b>KONDISI</b>
<b>A</b>	<b>KENDARAAN Roda 4</b>			
1	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1042 BZ	2021	Baik
2	Toyota Veloz	KT 1396 B	2022	Baik
3	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1716 BZ	2011	Baik
4	Mitsubhisi Expander	KT 1775 B	2022	Baik
5	Toyota Hilux	KT 8486 BZ	2021	Baik
6	Toyota INOVA	KT 1337 BZ	2010	Baik
8	Suzuki Mega Carry Extra / Pick Up	KT 8879 BZ	2012	Rusak Ringan
9	Suzuki AVP SGX	KT 1564 BZ	2010	Baik
10	Isuzu TBR 541 LM 25 Long	KT 2369 BZ	2003	Rusak Ringan
11	Toyota Avanza	KT 1014 BZ	2008	Baik
12	Toyota Avanza	KT 1540 BZ	2008	Baik
13	Toyota Avanza	KT 1015 BC	2005	Baik
14	Toyota Kijang STD	KT 2408 BZ	2001	Rusak Ringan
<b>B</b>	<b>KENDARAAN Roda 2</b>			
1	Sepeda motor/Yamaha 5 LM	KT 5730 B	2002	Baik
2	Sepeda Motor/Honda CB15A1RRF	KT 4759 M	2003	Baik
3	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4699 MZ	2008	Baik
4	Sepeda Motor/HondaGL 160 D	KT 4819 MZ	2009	Baik
5	Sepeda Motor/Honda GLP III	KT 4012 MZ	2004	Baik
6	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3252 M	2011	Baik
7	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3245 M	2011	Baik

8	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3429 MZ	2012	Baik
9	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3430 MZ	2012	Baik
10	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3431 MZ	2012	Baik
11	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5975 B	2020	Baik
12	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 6966 B	2020	Baik
13	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5979 B	2020	Baik
14	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5077 B	2020	Baik
15	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5700 B	2020	Baik
16	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5600 B	2020	Baik
17	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2309 B	2021	Baik
18	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2317 B	2021	Baik
19	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2324 B	2021	Baik
20	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2386 B	2021	Baik
21	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2372 B	2021	Baik
22	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2284 B	2021	Baik

*Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2024*

Dari Tabel di atas dapat diketahui jumlah kendaraan operasional yang terdapat di Dinas Perhubungan Prov Kaltim berjumlah 14 kendaraan roda empat dan 22 kendaraan roda dua kendaraan dan dalam keadaan baik.

**Tabel. 1.8**  
**Luas Bangunan dan Sarana Prasarana Penunjang Dinas**  
**Perhubungan Prov Kaltim 2021**

NO	URAIAN	LUAS BANGUNAN (M <sup>2</sup> )	JUMLAH	LUAS KESELURUHAN (M <sup>2</sup> )
1	Bangunan Gedung terdiri;			
	a. Bangunan Induk	2,950	2	5,900
	b. Gedung koperasi	180	1	180
	c. Gedung Dharma Wanita	419	1	419
	d. Musholla	157	1	157
	e. Kantin	32	1	32
	f. Bangunan baru	202	2	404
2	Ruang Rapat		2 Unit	
3	Area Parkir		3 Area	
4	Komputer		97 unit	
5	Telepon		16 Unit	
6	Website		1 Buah	
7	Papan Pengumuman		1 Unit	
8	Videotron		1 Unit	
<b>Luas Bangunan Keseluruhan</b>				7.092 M <sup>2</sup>

*Sumber: Subbag Umum Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2024*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan pada kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah seluas 7.092 M<sup>2</sup>.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2. 1 Perencanaan Strategis**

Tujuan pembangunan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Selain itu, tujuan dan sasaran yang dihasilkan juga memperhatikan penyelarasan indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Adapun slogan pembangunan periode tahun 2024-2026 adalah “Membangun Kaltim Untuk Nusantara”. Slogan “Membangun Kaltim Untuk Nusantara” pada tahap perencanaan pembangunan diterjemahkan ke dalam 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran strategis dalam RPD Tahun 2024-2026. Adapun, Dinas Perhubungan masuk pada Tujuan 2 (dua) yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” dan Sasaran 7 (tujuh) yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar”.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Prov.

Kalimantan Timur dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sektor perhubungan Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun ke depan.

### **1. TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)**

Dengan adanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mempengaruhi arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tujuan pembangunan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Adapun slogan pembangunan periode tahun 2024-2026 adalah **“Membangun Kaltim Untuk Nusantara”**.

Pada tahap perencanaan pembangunan diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), antara lain:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing;
- 2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
- 3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dari beberapa Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 di atas Dinas Perhubungan

Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab dan memiliki fokus pada tujuan ke-2 (dua) yaitu “**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**”.

## **2. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Pada tahap perencanaan pembangunan diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Tujuan dan 12 (dua belas) Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), antara lain:

- 1) Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat;
- 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Menurunnya Tingkat Pengangguran;
- 4) Meningkatnya Daya Saing Perempuan;
- 5) Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi;
- 6) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin;
- 7) Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar;
- 8) Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan;
- 9) Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan;
- 10) Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan;
- 11) Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK;

12) Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel.

Dari beberapa Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 di atas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab dan memiliki fokus pada sasaran ke-7 (tujuh) yaitu **“Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar”**.

### **3. TUJUAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar;
- 2) Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

### **4. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran penyelenggaraan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan pada peningkatan pemerataan fasilitas pelayanan transportasi secara adil, merata dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi sehingga pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2026 dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut, maka Dinas

Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2024-2026, sebagai berikut :

**Sasaran 1:**

- Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat-Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur

**Sasaran 2:**

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

## **5. INDIKATOR KINERJA**

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka sasaran sektor perhubungan sesuai RPD yaitu:

*“Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur”* dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Provinsi Sektor Perhubungan Tahun 2024-2026 (RPD)**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN			TARGET KINERJA AKHIR RPJMD
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
I	<b>Perhubungan</b>						
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	<b>0,846</b>	0,846	0,864	0,882	<b>0,882</b>

*Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024-2026*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Target Capaian Tiga Tahunan yang mendukung Visi dan Misi serta RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Indikator**  
**Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

<b>Tujuan 2 : “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”</b>									
<b>Sasaran 7 : “Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar”</b>									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA KEGIATAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat-Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,834	0,846	0,864	0,882	0,882
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Angka	75	76	77	78	78
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	82	83	85	87	87

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Dan Indikator Program**  
**Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

**Tujuan 2 : “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”**

**Sasaran 7 : “Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar”**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
							2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur	Rasio Konektivitas Provinsi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	185	175	165	155	155
					Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP (%)	77	82	86	90	90
					Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan (Angka)	0,007	0,006	0,005	0,004	0,004
				Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP (Angka)	0,91	0,96	0,98	1	1

				Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	20	40	45	55	55
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	69	70	74	76	76
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran Dan Indikator Program Dan kegiatan**  
**Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN			
								2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur	Rasio Konektivitas Provinsi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	80%	82%	85%	
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78%	74%	76%	
						Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (UPTD Terminal)	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53%	58%	60%
						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53%	58%	60%	

						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit	17 Unit	20 Unit
	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	100 Unit	120 Unit	130 Unit	
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit	310 Unit	325 Unit	
					Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit	105 Unit
						Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

					Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	60 Badan Usaha	65 Badan Usaha	70 Badan Usaha
					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi	1 Unit	2 Unit	3 Unit
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	40%	45%	55%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84%	92%	92%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93%	94%	95%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91%	92%	93%

Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah - UPTD Terminal	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60%	63%	70%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - UPTD Terminal	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	50%	60%	70%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - UPTD Terminal	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	30%	40%	50%	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100%	100%	100%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17%	20%	25%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91%	92%	93%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65%	70%	75%

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100%	100%	100%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - UPTD Terminal	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

## **2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

*(Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2015)*

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2024-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET			REALISASI		
								2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat-Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	Mengukur Pembobotan dari rasio konektivitas darat, laut & SDP, udara dan kawasan perkotaan di Kaltim	$KT_{Prov} = (KT_{DP} \times WT_{DP}) + (KT_{LSD} \times WT_{LSD}) + (KT_U \times WT_U) + (KT_P \times WT_P)$	Bidang LLAJ	Kepala Bidang LLAJ	0,846	0,864	0,882	0,846	-	-
						Bidang Pelayaran	Kepala Bidang Pelayaran						
						Bidang Pengembangan & Perkeretaapian	Kepala Bidang Pengembangan						
						UPTD Terminal	Kepala UPTD Terminal						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Angka	Mengukur Nilai Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perhitungan mempedomani Pergub Kaltim No.26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Bidang Sekretariat	Sekretaris Dishub Prov. Kaltim	76	77	78	76,8	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	Mengukur Nilai Rata-Rata Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik yang diberikan di Dishub dan UPTD Terminal	Perhitungan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Bidang Sekretariat	Sekretaris Dishub Prov. Kaltim	83	85	87	82,01	-	-

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

## **2.3 Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 telah ditetapkan target per tahun pencapaian kinerja hingga tiga tahun ke depan.

### **2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan/tahun anggaran. Adapun Revisi Perjanjian Kinerja di Tahun 2024 pada Perangkat daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 ☎ : Kadis (0541) 737264, TU (0541) 737267,738992,203833 Fax. (0541) 207033  
**S A M A R I N D A**

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Lisa Hasliana, M. Si.  
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si  
 Jabatan : Pj. Gubernur Kalimantan Timur  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, November 2024

**PIHAK KEDUA,**  
**Pj. Gubernur Kalimantan Timur**

  
  
**Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si**

**PIHAK PERTAMA,**  
**Plt. Kepala Dinas Perhubungan**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

  
  
**Ir. Lisa Hasliana, M. Si.**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19670719 199303 2 006**

**Tabel 2.6**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat-Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	Angka	0.846
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Angka	76
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	83

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dishub 2024

### 1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Prov Kaltim melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar **Rp 58.273.329.134,-** dan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 91.221.699.754,-**

### 2. Target Belanja Dinas Perhubungan

**Tabel 2.7**

**Target Belanja Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2024**

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023		
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
1	Pagu-P	Rp 91.221.699.754,-	Rp 86.787.855.298	95,14%

*Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024*

### 3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur	Rp 57.385.326.392	Rp 54.363.375.620	94,73%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Rp 33.836.373.362	Rp 32.424.479.678	95,83%

*Sumber: Sub Bagian Perencanaan Program dan Keu Dishub 2024*

**Tabel 2.9**  
**Pagu Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>Dinas Perhubungan Prov. Kaltim</b>			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.270.784.614	APBD-P
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	43.521.835.868	APBD-P
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3.224.400.000	APBD
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.082.400.000	APBD
<b>UPTD Terminal</b>			
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.565.588.748	APBD
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9.556.690.524	APBD-P
<b>Jumlah Anggaran APBD</b>		<b>91.221.699.754</b>	APBD-P

*Sumber : DPA-P Dishub Prov Kaltim Tahun 2024*

Tabel di atas menjelaskan bahwa Pagu Anggaran Belanja langsung Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp 91.221.699.754,-**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Sebelumnya (2023)

##### 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2023.

**TABEL 3.1  
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS  
IMPLEMENTASI SISTEM AKIP**

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2022	NILAI 2023	PENINGKATAN/ PENURUNAN CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	21.60	22.50	0.9
2	Pengukuran Kinerja	20%	14.80	15.40	0.6
3	Pelaporan Kinerja	10%	7.10	7.10	0.0
4	Evaluasi Kinerja	20%	12.60	15.40	2.8
5	Capaian Kinerja	20%	13.60	15.20	1.6
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>69.70</b>	<b>75.90</b>	<b>6.2</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2024

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 75.90 dengan predikat Kategori “BB” dengan Interpretasi (Sangat Baik).

## 2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim Terhadap Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Hasil tindak lanjut Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim menyajikan rekomendasi tindak lanjut dan rencana aksi atas implementasi Sistem AKIP sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**

### Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/ RENCANA AKSI	SUDAH/BELUM
I	<b>PERENCANAAN KINERJA :</b>		
1.	Pada komponen penilaian Perencanaan Kinerja untuk menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dalam kurun waktu 5 tahun; serta menetapkan target yang dapat dicapai ( <i>achievable</i> ), menantang, dan realistis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada RENSTRA DISHUB Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 IKU telah disusun untuk target selama 5 tahun yang merupakan tugas fungsi urusan perhubungan provinsi yaitu meningkatkan konektivitas provinsi;</li> <li>- IKU tersebut telah selaras dengan target nasional pada RENSTRA Kemenhub yang di evaluasi setiap tahun pada saat Rakortekrenbang Nasional;</li> <li>- Tingkat ketercapaian tujuan yang akan dicapai yang di gambarkan dengan IKU adalah mungkin untuk dicapai yaitu menghubungkan kawasan strategis di Prov.Kaltim;</li> <li>- Menantang dikarenakan masalah yang dihadapi cukup kompleks yang memerlukan kerjasama yang kuat dengan semua pemangku kepentingan;</li> <li>- Realistis dengan mempertimbangkan keadaan dan sumber daya yang ada untuk dapat terwujud dengan membuat perencanaan yang matang dan tahapan-tahapan pelaksanaan yang terinci;</li> <li>- Membuat manajemen risiko terhadap pencapaian tujuan sehingga dapat mengantisipasi terhadap kegagalan pencapaian tujuan.</li> </ul>	Sudah

II	PENGUKURAN KINERJA :		
1.	Mengumpulkan data kinerja yang relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan secara keseluruhan	Evaluasi target kinerja secara berjenjang setiap level organisasi dimonitor secara rutin dan dituangkan dalam dokumen capaian atas rencana aksi Dinas Perhubungan Prov Kaltim dikumpul secara berkala per triwulan kepada Biro Organisasi melalui aplikasi E-SAKIP.	Sudah
2.	Pengukuran Kinerja agar dimanfaatkan secara keseluruhan dan menjadi dasar dalam : - Pemberian <i>Reward and Punishment</i> ; - Penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional; - Pengusulan penyesuaian ( <i>Refocussing</i> ) organisasi; - Penyusunan strategi, kebijakan, dan aktivasi/kegiatan dalam mencapai kinerja Serta mendokumentasikan pemanfaatan pengukuran kinerja tersebut.	1. Hasil pengukuran kinerja berjenjang telah dimanfaatkan sebagai dasar reward dan punishment internal Dishub Prov. Kaltim evaluasi pimpinan terhadap hasil capaian kerja pegawai dari level eselon III, IV dan pelaksana (Teguran terkait kedisiplinan, pemberian nilai atas capaian kinerja IKI setiap bulan melalui aplikasi e-kinerja, dan catatan terhadap kesesuaian dan capaian kinerja dari pembina kinerja); 2. Penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional serta <i>refocussing</i> organisasi secara bertahap telah dilaksanakan dimulai dengan, penyederhanaan birokrasi, usulan untuk perubahan SOTK yang telah disahkan menjadi Pergub 43 Tahun 2023 tentang SOTK, penempatan formasi jabatan fungsional yang dimulai dengan ikut serta pegawai dalam UKOM; 3. Penyusunan strategi, kebijakan dan aktivasi/kegiatan dalam mencapai kinerja tertuang dalam Mekanisme Kinerja Dishub Prov. Kaltim.	Sudah
3.	Hasil pengukuran kinerja agar menginformasikan secara menyeluruh terkait penggunaan anggaran serta diperbandingkan dengan realisasi anggaran dan capaian sampai dengan 2 tahun kebelakang.	Pengukuran efisiensi anggaran dalam mendukung capaian kinerja program/kegiatan telah di analisa dan di informasikan dengan membandingkan sampai dengan 2 tahun kebelakang (BAB 3 LKJIP).	Sudah

III	PELAPORAN KINERJA :		
1.	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan atas seluruh capaian kinerja RENSTRA, IKU, dan PK.	Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan atas seluruh capaian kinerja RENSTRA, IKU dan PK telah di informasikan berserta analisisnya.	Sudah
2.	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya sampai dengan 3 tahun kebelakang.	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya sampai dengan 3 tahun kebelakang telah di informasikan berserta analisisnya.	Sudah

3.	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi sebagai evaluasi dukungan capaian perangkat daerah terhadap capaian realisasi kinerja di level provinsi telah di informasikan berserta analisisnya.	Sudah
4.	Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta perbandingan dengan capaian dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya	Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta perbandingan dengan capaian dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya telah di informasikan berserta analisisnya.	Sudah
5.	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam : a) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja b) Perbaikan/penyempurnaan budaya kinerja organisasi	a) Laporan kinerja telah digunakan sebagai informasi dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja khususnya pada belanja yang bersifat prioritas; b) Perbaikan budaya kinerja diarahkan pada penyesuaian sasaran kinerja pegawai dengan cascading kinerja.	Sudah

<b>IV</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL :</b>		
1.	Memberikan rekomendasi perbaikan dalam Evaluasi Kinerja Internal serta menyertakan bukti bahwa rekomendasi tersebut telah atau akan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi untuk adanya penyesuaian sasaran kinerja pegawai dengan cascading kinerja;</li> <li>- Rekomendasi untuk adanya catatan terhadap kinerja ASN sebagai bagian dari budaya kerja;</li> <li>- Rekomendasi untuk rencana penempatan dan sasaran kinerja pegawai PPPK.</li> </ul>	Sudah
2.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal atau peningkatan nilai implementasi SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada komponen perencanaan kinerja RENSTRA 2024-2029 telah memperbaiki cascading dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART;</li> <li>- Pada komponen pengukuran kinerja telah dijadikan dasar untuk Pemberian <i>Reward and Punishment</i>; Penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional; Pengusulan penyesuaian (Refocussing) organisasi; Penyusunan strategi, kebijakan, dan aktivasi/kegiatan dalam mencapai kinerja;</li> <li>- Pada komponen pelaporan kinerja telah di jadikan informasi dalam Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja; Perbaikan/penyempurnaan budaya kinerja organisasi.</li> </ul>	Sudah

3.	Memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai : a) Perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; b) Pendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	a) Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja melalui sistem informasi e-kinerja dan e-sakip; b) Perbaikan efektifitas indikator dan target kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya (SDM dan Anggaran).	Sudah
4.	Mengimplementasikan hasil tindak lanjut evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja (perencanaan selanjutnya).	Pada komponen perencanaan kinerja RENSTRA 2024-2029 telah memperbaiki cascading dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART; implementasi Mekanisme Kinerja.	Sudah
5.	Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta mendokumentasikan perbaikan yang telah dilakukan dan peningkatan kinerja yang terjadi	- Rapat/diskusi internal terkait penyusunan dan evaluasi capaian kinerja; - Penerapan Budaya Kerja BerAKHLAK; - Peningkatan Pelayanan Publik dengan SIMPEL LLAJ.	Sudah

<b>V</b>	<b>CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA :</b>		
1.	Pada komponen Capaian Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan capaian target target di masa yang akan datang dan capaiannya melebihi secara signifikan dari tahun ini serta lebih memperhatikan mengenai informasi kinerja dapat diandalkan yaitu dengan memastikan bahwa terdapat kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, data dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.	Komponen capaian akuntabilitas kinerja pada RENSTRA 2024-2026 mempunyai data dukung yang valid dan dapat diakses melalui portal satu data kaltim.	Sudah

Sumber: Subbag. Perencanaan program dan keuangan 2024

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa rekomendasi terhadap permasalahan yang ada telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Prov Kaltim sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

### 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Adapun target dan capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**

**Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0.846	Triwulan I	0	0	0 %
					Triwulan II	0	0	0 %
					Triwulan III	0	0	0 %
					Triwulan IV	0.846	0.846	100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Angka	76	Triwulan I	0	0	0%

Layanan Publik Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Indeks	83	Triwulan II	0	0	0%
				Triwulan III	0	0	0%
				Triwulan IV	76	76.8	101%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			Triwulan I	0	0	0%
				Triwulan II	83	81.91	98.68 %
				Triwulan III	0	0	0%
				Triwulan IV	83	82.01	98.80 %

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi atas capaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mencapai target yang telah telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis 2024-2026.

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan Gubernur Kalimantan Timur dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

#### SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur :

**Indikator Sasaran Strategis 1 (Satu) : Rasio Konektivitas Provinsi.**

**1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Realisasi capaian:

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0.846	0.846	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024

Dapat tercapainya realisasi pada tahun 2024 dikarenakan adanya kerjasama yang baik dengan *stakeholder* terkait dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan serta perolehan data pergerakan sarana transportasi, sehingga realisasi sasaran 1 melebihi target sasaran strategis 1.

**2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2024:**

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Sasaran Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya

keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2022, 2023 dan 2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			% PENINGKATAN / PENURUNAN TAHUN 2024
			2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	$7 = ((6/5) - 1) * 100$
1.	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0.816	0.834	0.846	1,44%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024

Persentase Rasio Konektivitas Provinsi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dan peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 1,44%. Peningkatan ini dikarenakan adanya komponen koneksi transportasi perkotaan dimana telah beroperasinya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Balikpapan City Trans pada tahun 2024.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPD:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Akhir Renstra**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (TH. 2026)	REALISASI (TH. 2024)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$
1.	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0.897	0.846	94,31 %

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 1 Pada Tahun 2024 hasil capaian realisasi sebesar 0.846 dari target 0.897 di akhir Renstra tahun 2026 dengan tingkat kemajuan sebesar 94,31%.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja :**

##### **Sasaran Strategis I (Indikator : Rasio Konektivitas Provinsi)**

##### **Analisis Keberhasilan & Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 1:**

Sasaran Strategis 1 pada Renstra 2018 – 2023 adalah Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman dimana sasaran tersebut berhubungan dengan sasaran strategis 1 pada Renstra 2024 – 2026 yaitu Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Perhubungan yang Berkualitas dan Berkeselamatan ke Pusat – Pusat Perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur, dimana kata kunci dari kedua sasaran tersebut adalah pada Konektivitas, Aksesibilitas dan Berkualitas/ Berkeselamatan/Infrastruktur dengan definisi sebagai berikut :

1. Konektivitas adalah tingkat keterhubungan wilayah dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi;
2. Aksesibilitas adalah kenyamanan atau kemudahan untuk mencapai suatu lokasi melalui sistem jaringan transportasi;
3. Berkualitas adalah tersedianya infrastruktur, lancarnya pergerakan angkutan umum serta kemudahan perizinan; dan

4. Berkeselamatan adalah kelaikan sarana dan prasarana perhubungan.

Sehingga Sasaran Startegis 1 dari Renstra 2018 – 2023 telah selaras dengan Renstra 2024 – 2026. Adapun indikator dari Renstra 2018 – 2023 adalah persentase pergerakan sarana transportasi dimana indikator tersebut kurang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan dari sasaran strategis tersebut sehingga pada indikator Renstra 2024 – 2026 digunakan indikator Rasio Konektivitas Provinsi dimana indikator ini mencerminkan tingkat keterhubungan wilayah / kawasan strategis provinsi yang mendukung perekonomian, dimana fokus nya adalah pembangunan simpul – simpul/infrastruktur transportasi, penyediaan angkutan umum dan fasilitas keselamatan jalan dan angkutan, yang di dukung melalui indikator program.

Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan melalui RTRW Provinsi Kaltim dimana kewenangan urusan perhubungan dilaksanakan oleh masing – masing mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota yang saling bersinergi untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Capaian Sasaran Strategis I: Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat – pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:**

## 1. Revitalisasi dan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B :

Pelaksanaan P3D Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah salah satunya adalah penyerahan kewenangan operasional Terminal Penumpang Tipe B ke Pemerintah Provinsi, kondisi Terminal Tipe B yang kurang baik saat diserahkan sehingga diperlukan Revitalisasi dan daerah yang belum ada Terminal Tipe B dilakukan Pembangunan. Terminal Tipe B merupakan simpul/infrastruktur transportasi yang menunjang konektivitas dan aksesibilitas. Upaya Dinas Perhubungan Prov. Kaltim untuk revitalisasi dan pembangunan terminal penumpang tipe B :

- a) Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Paser;
- b) Revitalisasi Terminal Tipe B Kota Bontang;
- c) Revitalisasi Terminal Tipe B Kab. Kutai Timur;
- d) Pemeliharaan Terminal Tipe B Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- e) Pemeliharaan Terminal Tipe B Lempake Kota Samarinda;
- f) Pemeliharaan Terminal Tipe B Kab. Kukar;
- g) Pemeliharaan Terminal Tipe B Kab. Berau.

## 2. Penyediaan dan perizinan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang :

Penyediaan angkutan umum sebagai sarana untuk menghubungkan simpul – simpul transportasi menjadi kewajiban yang di amanahkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, kondisi angkutan umum dan trayek yang dilayani di Kalimantan Timur masih menjadi perhatian khusus dikarenakan menurunnya keinginan masyarakat menggunakan angkutan umum dan menurunnya trayek yang melayani angkutan reguler maupun perintis, Dinas

Perhubungan Prov. Kaltim secara bertahap mengupayakan untuk meningkatkan kembali penggunaan angkutan umum dan pelayanan trayek reguler maupun perintis dengan upaya sebagai berikut :

- a) Penetapan tarif trayek reguler Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- b) Kajian jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan AKDP;
- c) Kajian subsidi tarif angkutan perintis;
- d) Kajian pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan kewenangan provinsi;
- e) Peningkatan pelayanan perizinan angkutan AKDP dengan SIMLLAJ;
- f) Kajian penetapan jaringan trayek dan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- g) Kajian subsidi ongkos angkut barang di perairan mahakam.

Kajian diatas merupakan tahapan awal untuk kembali meningkatkan penggunaan angkutan umum dan pelayanan trayek reguler maupun perintis dimana akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

### 3. Audit dan inspeksi keselamatan perusahaan angkutan umum :

Aspek keselamatan kendaraan umum merupakan aspek yang sangat penting sehingga pembinaan /sosialisasi terhadap perusahaan angkutan umum terus dilakukan.

### 4. Pemasangan perlengkapan jalan di jalan provinsi :

Perlengkapan jalan seperti rambu – rambu jalan, marka/paku marka jalan, pagar pengaman jalan, alat penerangan jalan (APJ) dan Zona Operasional Selamat Sekolah (ZOSS) berpengaruh langsung terhadap

keselamatan berlalu – lintas sehingga akan mendukung terhadap kelancaraan konektivitas dan aksesibilitas.

5. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas jaringan jalan provinsi :

Manajemen rekayasa lalu lintas terutama dilaksanakan terhadap kepatuhan pelaksanaan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk kegiatan usaha yang menggunakan jalan provinsi dan terhadap daerah rawan kecelakaan sehingga kinerja jalan dapat terjaga pada kondisi lancar serta penegakan hukum terhadap kendaraan barang yang *over dimensi dan over load* yang dapat mempercepat kerusakan jalan sehingga akan mendukung terhadap kelancaraan konektivitas dan aksesibilitas.

**Alternatif Solusi / Upaya Dalam Meningkatkan Rasio Konektivitas Provinsi :**

1. Kebijakan untuk melanjutkan revitalisasi dan pembangunan terminal tipe B dengan prioritas pentahapan dan menyeimbangkan dengan kemampuan fiskal anggaran;
2. Melanjutkan hasil kajian peningkatan pelayanan angkutan umum baik berupa penetapan kebijakan/regulasi (Pergub/SK Gub), pengadaan subsidi angkutan barang terkait pengendalian inflasi dan pengadaan angkutan umum berbasis jalan dengan skema *Buy The Service* (BTS) ;
3. Melaksanakan sosialisasi kendaraan yang berkeselamatan secara berkesinambungan dengan metode yang efisien dan efektif khususnya terhadap kendaraan angkutan

umum barang (tenaga ahli dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi/KNKT ).

4. Meningkatkan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan antara lain Alat Penerangan Jalan (APJ), Rambu Jalan, Marka/Paku Marka Jalan, ZOSS yang diharapkan akan meningkatkan kewaspadaan pengemudi saat berlalu lintas di jalan;
5. Secara berkesinambungan untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin andalalin, penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL dan realisasi hasil rekomendasi untuk daerah rawan kecelakaan.

#### **5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 1 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1**  
**(Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan**  
**yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat**  
**perekonomian di wilayah Kalimantan Timur)**

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket.
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	%	80	80	100	Kabid LLAJ	APBD
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (DISHUB & UPTD TERMINAL)	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	%	53	53	100	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	Dokumen	4	4	100	Kabid LLAJ	APBD
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	78	78	100	Kabid LLAJ	APBD
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	Unit Usaha	15	15	100	Kabid LLAJ	APBD
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	Dokumen	1	1	100	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh	Unit	100	100	100	Kabid LLAJ	APBD

		Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perizinan							
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	Unit	300	300	100	Kabid LLAJ	APBD	

2	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	Unit	100	101	101	Kabid Pelayaran	APBD
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	Dokumen	2	2	100	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan	Badan Usaha	60	75	130	Kabid Pelayaran	APBD

		Peti Kemas							
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Unit	3	3	100	Kabid Pelayaran	APBD
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	%	50	40	80	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD

Sumber: Dinas Perhubungan Kaltim 2024

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 1 Dinas perhubungan memiliki 3 (tiga) Program strategis yaitu sebagai berikut :

**a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):**

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Dishub);
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (UPTD Terminal);
4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
8. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

**b. Program Pengelolaan Pelayaran:**

1. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan;
2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi;
3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas;
4. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

**c. Program Pengelolaan Perkeretaapian:**

1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian.

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1**

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur	100	94,73	5,27

Sumber: Olah data 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 5,27%.

### **SASARAN STRATEGIS 2**

#### **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah**

#### **A. Indikator 1 (Satu) Sasaran Strategis 2 (Dua): Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

##### **1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Realisasi capaian:

**Tabel 3.10**  
**Pengukuran Capaian Indikator 1 Sasaran Strategis 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Angka	76	76,8	101

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil dari pengukuran capaian indikatif indikator 1 (Satu) sasaran strategis 2 (Dua) memiliki realisasi 101% dimana hasil tersebut melebihi hasil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2024-2026.

## **2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2024:**

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan perbandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Indikator Indikatif 1 (Satu) Sasaran Strategis 2 (Dua) Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2022 - 2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			% PENINGKATAN / PENURUNAN TAHUN 2024
			2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	$7 = ((6/5) - 1) * 100$
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Angka	69.7	75.9	76.8	1.18%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil capaian indikator indikatif 1 (Satu) sasaran 2 (Dua) (Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil peningkatan 1.18%.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPD:**

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Indikator 1 Sasaran Strategis 2**  
**Terhadap Target Akhir Renstra**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (TH. 2026)	REALISASI (TH. 2024)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Angka	78	76.8	98.46%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator 1 (Satu) sasaran strategis 2 (Dua) memiliki hasil capaian realisasi indikatif sebesar 76.8 dari target 78 di akhir Renstra dengan tingkat kemajuan sebesar 98.46%.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :**

##### **Sasaran Strategis 2 (Indikator 1 (Satu) : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)**

- **Analisis Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Indikator 1 Sasaran Strategis 2**

Analisis Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan baik dengan melihat realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1 (Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah).

1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

**Tabel 3.13**  
**Tabel Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Dinas**  
**Perhubungan Prov. Kaltim Tahun 2022 - 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Tahun	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	22,50
2	Pengukuran Kinerja	20,00	14,80	15,40
3	Pelaporan Kinerja	10,00	7,10	7,40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,00	12,60	15,40
5	Capaian Kinerja	20,00	13,60	15,20
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,70	75,90
			<b>B</b>	<b>BB</b>

*Sumber: LHE Evaluasi Sakip Dishub Prov. Kaltim 2023*

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai implementasi Sistem AKIP Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 10.8% dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai SAKIP 75.90 dengan Predikat Penilaian “BB” (Sangat Baik) pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan nilai SAKIP 69.70 dengan Predikat Penilaian “B” (Baik) pada tahun 2022.

Adapun uraian hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP terhadap masing-masing komponen yang dinilai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja (15,40)

- 1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai 5,40
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (*Cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*Crosscutting*) memperoleh nilai sebesar 8,10
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 9,00

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan memperoleh nilai 4,00
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 5,40
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 6,00

c. Pelaporan Kinerja (7,40)

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja memperoleh nilai 2,00
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja,

informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya memperoleh nilai 2,40

- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 3,00

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (15,40)

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai sebesar 4,00
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 5,40
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 6,00

e. Capaian Akuntabilitas Kinerja (15,20)

- 1) Capaian Kinerja Sasaran memperoleh nilai 7,20
- 2) Capaian Kinerja Lainnya memperoleh nilai 8,00

• **Alternatif Solusi / Upaya Dalam Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Terhadap nilai SAKIP yang telah diperoleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tahun 2023 di atas, Inspektorat selaku tim evaluator merekomendasikan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Pada komponen penilaian Perencanaan Kinerja untuk menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dalam kurun waktu 5 tahun; serta menetapkan target yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Mengumpulkan data kinerja yang relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan secara keseluruhan.
- 2) Pengukuran kinerja agar dimanfaatkan secara keseluruhan dan menjadi dasar dalam, Pemberian Reward and Punishment, Penempatan/Penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, Pengusulan penyesuaian (Refocusing) organisasi, Penyesuaian strategi, kebijakan, dan Aktivitas/Kegiatan dalam mencapai kinerja, Serta mendokumentasikan pemanfaatan pengukuran kinerja tersebut.
- 3) Hasil pengukuran kinerja agar menginformasikan secara menyeluruh terkait penggunaan anggaran serta diperbandingkan dengan realisasi anggaran dan capaian sampai dengan 2 tahun kebelakang.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan atas seluruh capaian kinerja Renstra, IKU, dan PK;

- 2) Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 3 tahun kebelakang;
- 3) Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi;
- 4) Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta perbandingan dengan capaian dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya;
- 5) Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan Perbaikan/penyempurnaan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Memberikan rekomendasi perbaikan dalam Evaluasi Kinerja Internal serta menyertakan bukti bahwa rekomendasi tersebut telah atau akan dilaksanakan;
- 2) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan nilai implementasi SAKIP;
- 3) Memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai Perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta Pendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
- 4) Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta mendokumentasikan perbaikan yang telah dilakukan dan peningkatan kinerja yang terjadi.

e. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Pada komponen Capaian Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan capaian target di masa yang akan datang dan capaiannya melebihi secara signifikan dari tahun ini serta lebih memperhatikan mengenai Informasi kinerja dapat diandalkan yaitu dengan memastikan bahwa terdapat kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, data dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

**2. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
**Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Indikator 1**  
**Sasaran 2 (Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)**

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGUNG JAWAB	KET.
<b>Dinas Perhubungan</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	84	84	100.00%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	93	95.14	102%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	%	91	91	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik	%	66	66	100%	Kasubbag Umum	APBD
<b>UPTD Terminal</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	%	60	60	100%	Kasubbag Tata Usaha - UPTD Terminal	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	50	50	100%	Kasubbag Tata Usaha - UPTD Terminal	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik	%	30	30	100%	Kasubbag Tata Usaha - UPTD Terminal	APBD

Sumber : Dinas Perhubungan Prov kaltim 2024

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 2 Indikator 1 Dinas perhubungan memiliki 2 (dua) Program strategis yaitu sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dishub):**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Terminal):**

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**Tabel 3.18**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada**  
**Indikator 1 Sasaran 2**

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	96,33	3,67

*Sumber: Olah data Dinas Perhubungan 2024*

**Tabel 3.18**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada**  
**Indikator 1 Sasaran 2**

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	101	99.63	1.37

*Sumber: Olah data Dinas Perhubungan 2024*

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 1.37%.

## **B. Indikator 2 (Dua) Sasaran Strategis 2 (Dua): Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah**

### **1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Realisasi capaian:

**Tabel 3.19**

#### **Pengukuran Capaian Indikator 2 Sasaran Strategis 2**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	82.01	98.81

*Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024*

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil dari pengukuran capaian indikator 2 (Dua) sasaran strategis 2 (Dua) memiliki realisasi 98,81%.

### **2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Indikator 2 (Dua) Sasaran Strategis 2 (Dua) Tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja**  
**dengan Tahun 2023 dan 2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			% PENINGKATAN / PENURUNAN TAHUN 2024
			2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	$7 = ((6/5) - 1) * 100$
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.48	81.47	82.01	0.66%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2024

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil capaian indikator 2 sasaran 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) 82.01 jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil peningkatan 0.66%.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPD:**

**Tabel 3.21**  
**Realisasi Indikator 2 Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Akhir Renstra**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (TH. 2026)	REALISASI (TH. 2024)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) * 100$
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87	82.01	94.26%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2024

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 2 indikator 2 memiliki hasil capaian realisasi sebesar 82.01 dari target 87 diakhir renstra dengan tingkat kemajuan sebesar 94.26%.

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :**

## **Sasaran Strategis 2 (Indikator 2 (Dua) : Indeks Kepuasan Masyarakat)**

### **• Analisis Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Indikator 2 Sasaran Strategis 2**

Analisis Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, baik dari segi fasilitas, pelayanan petugas, kenyamanan, kebersihan, hingga kelancaran operasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan).

1. Hasil Survei Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan

**Tabel 3.22**  
**Hasil IKLI dan SKM Pada UPTD Terminal**

No.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi					
	Tahun 2019 (SKM)	Tahun 2020 (SKM)	Tahun 2021 (SKM)	Tahun 2022 (SKM)	Tahun 2023 (SKM)	Tahun 2024 (SKM)
1.	76.6	79.22	79.68	80.21	79.80	78.75

*Sumber: IKLI BAPPEDA Tahun 2019 dan SKM Dishub Kaltim 2024*

### **Hasil SKM Tahun 2023**

1. Terminal Sungai Kunjang memiliki nilai : 79.03
2. Terminal Lempake memiliki nilai : 78.27
3. Terminal Bontang memiliki nilai : 78.66
4. Terminal Sangatta memiliki nilai : 78.28
5. Terminal Tenggarong memiliki nilai : 77.75
6. Terminal Paser memiliki nilai : 78.60

7. Terminal Berau memiliki nilai : 80.67

Jika secara keseluruhan dirata-ratakan maka Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Terminal Tipe B) memiliki Nilai 78.75 **dengan kategori Baik.**

Dari tabel dan capaian SKM di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 masyarakat di Kalimantan Timur melalui tim penyusun dan penilai Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Kaltim dapat diketahui bahwa pelayanan infrastruktur perhubungan dinilai sangat baik karena mencapai target kerja yaitu 76.6 sedangkan mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Prov kaltim menggunakan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada 7 (Tujuh) Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi di masing-masing terminal, antara lain:

- a. Terminal Sungai Kunjang dengan populasi 96 orang dengan sampel 76 orang;
- b. Terminal Lempake dengan populasi 100 orang dengan sampel 80 orang;
- c. Terminal Bontang dengan populasi 90 orang dengan sampel 73 orang;
- d. Terminal Sangatta dengan populasi 85 orang dengan sampel 75 orang;
- e. Terminal Tenggarong dengan populasi 80 orang dengan sampel 66 orang;
- f. Terminal Paser dengan populasi 110 orang dengan sampel 86 orang;

- g. Terminal Rinding Berau dengan populasi 115 orang dengan sampel 90 orang

Keseluruhan populasi dan sampel dari masing-masing terminal, responden diambil secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut diolah data yang sehingga mendapatkan nilai 78.75 (B).

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan dan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan standar pelayanan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Selain melakukan survei kepuasan masyarakat pada Terminal Tipe B Prov. Kaltim, survei kepuasan masyarakat juga dilakukan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim (terkait pelayanan), antara lain:

- Layanan Penerbitan Sertifikasi Standar Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
- Layanan Penerbitan Sertifikasi Standar Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- Layanan Pertimbangan Teknis Pengoperasian Angkutan Khusus Sungai dan Danau;
- Layanan Pertimbangan Teknis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan;
- Layanan Kartu Pengawasan Pertimbangan Teknis Trayek ASDP/Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Layanan Pertimbangan Teknis Penyelenggaran Angkutan Orang;
- Layanan Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP);
- Layanan Peremajaan/Penggantian dan Penambahan Kendaraan;
- Layanan Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

**Tabel 3.23**  
**Hasil IKM Pada Dinas Perhubungan**

NO	INDEKS KEPUASAN LAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM	
	IKM TAHUN 2023	IKM TAHUN 2024
NILAI IKM	81.47	82.01

*Sumber: SKM Dishub Kaltim 2024*

Untuk mencapai capaian sasaran strategis 2 dinas perhubungan membagi bobot Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 50% untuk IKM UPTD Terminal dan 50% untuk IKM Dinas Perhubungan sehingga diperoleh hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar **82.01** dari target 83.

3. Adanya analisis hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat dan layanan dengan membuat rencana tindak lanjut perbaikan yaitu dengan cara mengidentifikasi akar permasalahan dan membuat perubahan yang diperlukan agar pelayanan semakin optimal;
4. Menyusun rencana jangka panjang untuk perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan berdasarkan hasil analisis dan masukan dari masyarakat atau pengguna layanan.

• **Alternatif Solusi / Upaya Dalam Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan atau sarana dan prasarana yang ada di setiap Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Prov. Kaltim seperti Kamar mandi (WC Umum) yang terpisah antara pria dan wanita maupun

penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum;

2. Perlu adanya peningkatan penyusunan survei kepuasan masyarakat dengan atau bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap matang atau lebih berpengalaman agar pengolahan data yang didapat bisa lebih akurat dan lebih matang dengan demikian maka dapat membantu instansi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Khususnya UPTD Terminal Tipe B dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan;
3. Melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkala kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap profesionalisme petugas. Sehingga petugas dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
4. Menerapkan standar layanan yang jelas dan menyederhanakan prosedur administrasi yang ada sehingga mempermudah masyarakat untuk mengakses dan menerima pelayanan yang dibutuhkan secara maksimal.

## **5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.24**  
**Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 2**  
**(Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan)**

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	%	93	95.14	102.3	Sekretaris	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	17	23.52	138.35	Sekretaris	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	%	91	91	100	Sekretaris	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	65	65	100	Sekretaris	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	%	100	100	100	Sekretaris	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Terminal)	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	%	100	100	100	Kepala UPTD Terminal	APBD

*Sumber : Dinas Perhubungan Prov kaltim 2024*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 2 Dinas perhubungan memiliki 1(Satu) Program yaitu sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:**

1. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – UPTD Terminal

**3.4 Capaian Tujuan Pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

**Tabel 3.25**  
**Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>TARGET INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>REALISASI TAHUN 2024</b>
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks)	84	84.19

*Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2024*

Dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan pada RPD Tahun 2024-2026 di Tahun 2024 dapat melebihi Target Indikator Tujuan.

**Tabel 3.26**  
**Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan**  
**Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Tipe B**

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI	PERSENTASE	PAGU APBD	JUMLAH PROGRAM / KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN		TOTAL PROGRAM / KEGIATAN		KET.
					PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2022	Rp 51.039.267.661	Rp 45.774.032.620	89.68%	Rp 51.039.267.661	4	24	4	24	APBD
2023	Rp 90.748.130.362	Rp 83.938.119.350	92.50%	Rp 90.748.130.362	4	25	4	25	APBD
2024	Rp 91.221.699.754	Rp 86.787.855.298	95.14%	Rp 91.221.699.754	4	21	4	21	APBD

*Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2024*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Penggunaan Anggaran Tahun 2024 memiliki nilai penyerapan sebesar 95.14% sedangkan tahun 2023 penyerapan realisasi anggaran sebesar 92.50%.

**Tabel 3.27**  
**Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur	0.846	0.846	100	57.385.326.392	54.363.375.620	5.27
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	76	76.8*	101	21.832.330.551	21.031.499.632	3.67
		83			12.004.042.811	11.392.980.046	5.09
<b>JUMLAH</b>					91.221.699.754	86.787.855.298	4.86

\*Angka Sementara

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2024

**Tabel 3.28**  
**Realisasi Anggaran Per Program**

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Keterangan
<b>Dinas Perhubungan</b>						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.270.784.614	28.050.658.171	95.83	4.17	APBD-P
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	43.521.835.868	42.134.021.352	96.81	3.19	APBD-P
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3.224.400.000	2.981.221.618	92.46	7.54	APBD
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.082.400.000	1.005.475.618	92.89	7.11	APBD
<b>UPTD Terminal</b>						
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.565.588.748	4.373.821.507	95.80	4.20	APBD
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9.556.690.524	8.242.657.032	86.25	13.75	APBD-P
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>91.221.699.754</b>	<b>86.787.855.298</b>	<b>95.14</b>	<b>4.86</b>	APBD-P

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Prov. Katim 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah disusun dalam Dokumen LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Pertama (2024) memiliki hasil capaian sebagai berikut:

1. Pada Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur, dengan indikator kinerja “ Rasio Konektivitas Provinsi” memiliki target sebesar 0.846 dan memiliki realisasi capaian kerja 0.846 sesuai target sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 100% ;
2. Pada Sasaran Strategis 2 Indikator 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja “ Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” memiliki target sebesar 78 dan memiliki realisasi capaian kerja 76.8\* (Angka Sementara) sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 101,05%;
3. Pada Sasaran Strategis 2 Indikator 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja “ Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah” memiliki target sebesar 83 dan memiliki realisasi capaian kerja 82.01 sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 98,81%;

4. Capaian Indikator Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar, dengan indikator kinerja “Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan” memiliki target sebesar 84 dan memiliki realisasi capaian kerja 84.19 sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 100,22%.

#### **4.2 Saran**

Dari Analisis Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Tahun Anggaran Tahun 2024, diperlukan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel dan bermanfaat diperlukan komitmen pimpinan terhadap tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi dari setiap komponen implementasi sistem AKIP, sehingga kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat terukur dan meningkat sesuai target;
2. Perlu adanya evaluasi secara berjenjang terkait indikator, target dan capaian-capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Prov Kaltim pada tahun berjalan untuk menunjang capaian tujuan di RPD baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan;
3. Untuk meningkatkan capaian sasaran strategis dan tujuan perlu adanya peningkatan kerjasama antara *stakeholder* urusan perhubungan di Kalimantan Timur sehingga terjalin sinergitas program dan kegiatan yang akan menunjang capaian kinerja sasaran strategis dan tujuan pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur.